

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BELA NEGARA DI PUSDIKIF DALAM RANGKA MEMBANGUN KESADARAN
BELA NEGARA PEMUDA INDONESIA**

**OPTIMIZATION OF DEFEND THE STATE EDUCATION AND TRAINING
IN PUSDIKIF IN ORDER TO ESTABLISH INDONESIAN YOUTH STATE
AWARENESS**

Yuda Sancoyo¹, Herlina Juni Risma Saragih², Ahmad G Dohamid³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

(yudasancoyo@gmail.com)

Abstrak -- Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Peran penting Bela Negara dalam perspektif pertahanan adalah untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya terhadap ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Pemuda merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertahanan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan bela negara terhadap pemuda diharapkan para pemuda memiliki kemampuan dasar bela negara dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Penelitian ini mencoba menggali permasalahan dalam 10 komponen penelitian pada pendidikan bela negara di Pusdikif. Penulis menganalisa penyelenggaraan bela negara di pusdikif TNI AD dilihat dari kondisi 10 (sepuluh) komponen pendidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para nara sumber yang kompeten yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bela negara di pusdikif belum optimal. Kelemahan utama dari penyelenggaraan pendidikan bela negara di Pusdikif adalah belum adanya standart baku yang dapat diterapkan dalam penentuan kriteria kondisi 10 komponen pendidikan dan permasalahan anggaran yang tidak mendukung bagi pengembangan program pendidikan bela negara di Pusdikif. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan bela negara diperlukan standar penyelenggaraan pendidikan bela negara dan menyediakan anggaran dalam program pendidikan bela negara dengan menjadikan diklat bela negara sebagai kegiatan program.Pusdikif.

Kata Kunci: Pendidikan, Bela Negara, Pusdikif

¹ Mahasiswa pada Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan

² Sesprodi Doktoral Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Kasubbag Kemahasiswaan Universitas Pertahanan

Abstract -- Defend the State is the right and obligation of all Indonesian people to protect the existence of the country. The important role of Defend the State in the defense perspective is to safeguard the integrity of the Indonesian territory, along with all its resources, sovereignty and independence against external threats and internal threats. Youth is a human resource that is expected to be the backbone of the Indonesian defense. Through the education of defending the country against youth, it is hoped that the youth will have the basic ability to defend the country and have a love for the homeland and the Indonesian people. The research problem is about the not optimal implementation of Defend the State Education and Training in Pusdikif. The purpose of this study was to analyze the implementation of Defend the State Education in Pusdikif as seen from the condition of 10 (ten) components of education. Research uses qualitative methods. Data were obtained through interviews with competent resource persons who were then analyzed qualitatively. The results of the study showed that the implementation of education Defend the State in Pesdikif was not optimal. The main weakness of the implementation of Defend the State education in the Pusdikif is that there is no standard that can be applied in determining the criteria for the condition of the 10 components of education. Efforts that can be made to optimize the implementation of Defend the State education are by the standard of implementing Defend the State education.

Keywords: Education, Defend the State, Pusdikif

Latar Belakang

Bangsa Indonesia memandang Bela Negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dilihat dari perspektif pertahanan, bela negara merupakan upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya terhadap ancaman agresi asing ataupun pergolakan bersenjata dari dalam.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara”; kemudian diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara”. Penjabaran lebih lanjut tentang hak dan kewajiban dalam pembelaan negara, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang berbunyi: “Pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional”. Dengan demikian maka sistem pertahanan negara kita menganut sistem pertahanan semesta yang menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan.

Pengertian Bela Negara menurut Darji Darmodiharjo, dijelaskan bahwa di Indonesia, pembelaan negara

berlandaskan doktrin keamanan nasional dan berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya.⁴ Menurut Purnomo Yusgiantoro, membela bangsa dan negara bisa ditumbuhkan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) karena bela negara merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.⁵ Dengan demikian bela negara bagi bangsa Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.

Kesadaran bela negara dapat dipandang sebagai kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban

membela negara. Bentuk perwujudan bela negara dapat berupa banyak hal seperti hubungan baik sesama warga negara ataupun bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Kita dipandang telah melakukan bela negara hanya dengan bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan demikian maka kesadaran bela negara merupakan kondisi psikologis yang berbentuk sikap dan perilaku serta tindakan tanggap dari setiap warga negara terhadap suatu hal yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sebagai negara yang menganut system pertahanan semesta kesadaran bela negara yang demikian rupa menjadi sangat penting bagi kelangsungan atau eksistensi suatu bangsa. Namun kenyataannya, kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat itu masih sangat tipis atau rendah. Indikator adanya penurunan kesadaran akan arti pentingnya bela negara terlihat dari kebiasaan pemuda yang lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa

⁴ Darji Darmodiharjo, dkk. 1991. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usana Offset. Printing. Hal.67.

⁵ Purnomo Yusgiantoro, 2010, Ekonomi Pertahanan, Jakarta : PT Gramedia. Hal.39.

lain dan tidak bangga dengan budaya bangsa sendiri. Generasi muda cenderung meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa dengan memamerkan ciri westernisasi. Dan semakin banyaknya perilaku generasi muda yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”

Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara khususnya para pemuda. Pemuda dan kesadaran bela Negara adalah sesuatu yang memiliki keselarasan dalam jiwa masing-masing orang terutama dari dalam diri pemuda. Membangun Kesadaran Bela Negara pada pemuda merupakan sesuatu yang penting dan tidak bisa dianggap suatu hal yang sepele. Salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran bela negara para pemuda adalah melalui pendidikan bela negara.

Pelatihan (*training*) menurut Edwin B. Flippo, sebagaimana dikutip oleh Hasibuan, yaitu merupakan “Suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang pegawai untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.”⁶ Menurut pasal 1 ayat 9 undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pelatihan adalah “Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. ”. Menurut John Suprihanto, pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan ketrampilan.⁷ Menurut Syamsuddin yang dikutip oleh Pujirahayu, diklat adalah suatu proses dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terus menerus bagi suatu organisasi agar karyawan yang mengikuti diklat mampu mengembangkan karir dan aktivitas kerjanya di dalam mengembangkan,

⁶ Malayu Hasibuan . 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal.70.

⁷ John Suprihanto . 1988. Penilaian Pelaksanaan dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta: BPFEE. hal.86.

memperbaiki perilaku kerja karyawan, mempersiapkan karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih rumit dan sulit, serta mempersiapkan tenaga untuk mengembangkan aktivitas kerjanya.⁸

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan latihan (diklat) merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk siswa didik untuk mempelajari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*) atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejak tahun 2015 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggulirkan kebijakan pelaksanaan program Bela Negara bagi masyarakat yang berumur 50 tahun ke bawah⁹ yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Tujuan dari program bela negara tersebut adalah menumbuhkan lima nilai dasar, yakni: rasa cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta

memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik dan nonfisik.

TNI AD sebagai bagian dari TNI, yang merupakan komponen utama kekuatan pertahanan negara di darat, bersama komponen kekuatan pertahanan NKRI lainnya, harus dapat memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga siap dimobilisasi dan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan kesemestaan dalam menanggulangi setiap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan NKRI. Sesuai dengan Sishanta tersebut maka TNI AD harus dapat memberdayakan masyarakat/rakyat Indonesia menjadi suatu kekuatan pendukung pertahanan. Oleh karena itu, selama dua tahun terakhir, TNI AD melalui satuan-satuannya di seluruh Indonesia telah menyelenggarakan pendidikan bela Negara bagi kelompok masyarakat baik dari instansi negeri maupun swasta. Satuan-satuan TNI merupakan ujung tombak operasional di lapangan yang sangat dominan menentukan keberhasilan program bela negara. Tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga

⁸ Rostanti Pujirahayu. (2008). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusiadalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat pada Aparatur Sekretariat Daerah. Hal.18.

⁹<http://news.liputan6.com/read/2339910/meramu-wajib-militer-ala-indonesia>

pendidikan TNI AD akan tetapi satuan-satuan Komando Kewilayahan (Kowil), satuan tempur dan satuan lainnya juga menyelenggarakan program bela negari ini.

Pusdikif TNI AD merupakan salah satu instansi pendidikan TNI AD yang turut menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bela Negara bagi pemuda-pemuda dari berbagai instansi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara di Pusdikif harus terus ditingkatkan agar mampu lebih baik dalam meningkatkan kesadaran bela Negara para peserta didik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Pusdikif terdapat 10 (sepuluh) komponen pendidikan yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bela negara. Kesiapan dan penggunaan 10 komponen pendidikan adalah Paket Instruksi, Gadik, Gapendik, Serdik, Alins/Alongins, Fasdik, Metode, Evaluasi dan Anggaran sangat mempengaruhi pencapaian hasil penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu

periode jenjang pendidikan. Paket Instruksi merupakan kelengkapan tenaga pendidik dalam kesiapan memberikan materi pelajaran guna pencapaian tujuan kurikuler/pelajaran. Tenaga Pendidik (Gadik) adalah personel Angkatan Darat atau sipil yang bertugas memberikan bekal ilmu pengetahuan, kecakapan, Keterampilan serta pembentukan maupun pengembangan kepribadian Serdik melalui upaya mengajar, melatih dan mengasuh/membimbing. Gapendik adalah seluruh personel organik lembaga pendidikan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan operasional suatu pendidikan. Peserta didik (Serdik) adalah anggota Milsuk/Milwa yang mengikuti suatu pendidikan/kursus tingkat Perwira, Bintara dan Tamtama yang diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga Pendidikan didalam berjenjang maupun tidak berjenjang (Mos, Training) yang memenuhi persyaratan pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Alat Instruksi (Alins) adalah sarana pendidikan yang berupa alat maupun perlengkapan yang langsung diperlukan untuk menolong dan melengkapi Gadik dalam pelaksanaan mengajar dengan efektif. Alat Penolong Instruksi (Alongins) adalah alat peraga

yang dipergunakan oleh Gadik untuk memperjelas pelajaran. Fasilitas pendidikan (Fasdik) terdiri dari semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran. Metode Mengajar merupakan cara menyampaikan materi pelajaran oleh Gadik kepada Serdik. Evaluasi Pendidikan adalah suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik.

Fenomena yang terjadi saat ini dimana tenaga pendidik masih belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, dampaknya proses pendidikan terhambat dan tidak optimal karena belum memiliki spesifikasi pengetahuan bela negara. Kurikulum pendidikan masih dipengaruhi oleh instansi peserta didik. Penetapan metode pendidikan diserahkan pada tenaga pendidik. Anggaran yang belum mampu untuk

mendukung kegiatan pengembangan pendidikan bela negara karena berasal dari instansi peserta didik serta kondisi-kondisi dari 10 komponen pendidikan lainnya yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi 10 komponen pendidikan khususnya yang memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bela negara. Pada umumnya optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat digaris bawahi bahwa optimalisasi dapat diartikan sebagai pencarian nilai terbaik dari kondisi sebelumnya dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Dengan demikian maka optimalisasi dalam penelitian ini merupakan usaha memaksimalkan kondisi dari 10 Komponen Pendidikan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bela Negara sehingga mewujudkan harapan yang diinginkan atau dikehendaki.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan bela negara, maka kita perlu mengetahui bagaimana Kurikulum, Paket Instruksi, Gadik, Gapendik, Serdik, Alins/Alongins, Fasdik,

Metode, Evaluasi dan Anggaran pada penyelenggaraan Diklat bela Negara pada satuan Pusdikif saat ini. Selanjutnya diperlukan analisa dalam mengetahui bagaimana 10 komponen pendidikan di pusdikif yang belum optimal pada penyelenggaraan Diklat Bela Negara di Pusdikif dalam rangka mewujudkan kesadaran bela Negara Pemuda. Dengan diperolehnya kedua jawaban atas permasalahan tersebut kita dapat menentukan upaya yang tepat dalam mengoptimalkan 10 komponen pendidikan bela negara.

Syafaruddin mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian maka kerangka kerja (*frame work*) manajemen pendidikan terdiri dari prinsip-prinsip dan teori manajemen umum yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan untuk mengelola kegiatan pendidikan pada suatu organisasi pendidikan formal.

Pendapat Owens yang terdapat dalam buku Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, menjelaskan bahwa manajemen pendidikan berasal dari aktivitas dalam urusan sekolah yang

mencakup pengelolaan aktivitas pengajaran, kepemimpinan dan berbagai aturan, perencanaan, prosedur pelaksanaan dan manajemen pengawasan.

Dari pendapat tersebut dapat digaris bawahi bahwa manajemen pendidikan merupakan proses penerapan prinsip dan teori manajemen dalam pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan formal untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian maka manajemen pendidikan merupakan aplikasi prinsip, konsep dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dalam proses pendidikan terdapat fungsi-fungsi Manajemen yang terdiri dari:

- a) Perencanaan (*Planning*) merupakan proses kegiatan untuk menyajikan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pelaksanaannya dengan membagi tugas, tanggung jawab, serta wewenang diantara kelompoknya, ditentukan juga yang akan menjadi

pemimpin dan saling berintegrasi dengan aktif.

- c) Penggerakan (*Actuating*) merupakan usaha untuk mengarahkan atau menggerakkan tenaga kerja atau man power dan mendayagunakan fasilitas yang tersedia guna melaksanakan pekerjaan secara bersamaan. d. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati dan mengukur segala kegiatan operasi dan pencapaian hasil dengan membandingkan standar yang terlihat dalam rencana sebelumnya.

Penerapan manajemen pendidikan pada pendidikan bela Negara diharapkan dapat menjadi cara yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan bela Negara khususnya di Pusdikif.

Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) di Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan badan pelaksana Pussenif Kodiklat TNI AD.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang akan digunakan adalah data yang mendukung analisis dan pembahasan, yang diperoleh dari pejabat yang secara langsung terlibat

dalam proses pendidikan Bela negara di Pusdikif TNI AD.

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara yang di dukung dengan kegiatan observasi. Subyek dalam penelitian ini adalah Unsur pimpinan Pusdikif dan penyelenggara pendidikan di lingkungan Pusdikif diantaranya Kasijianbangdik Pusdikif, Kasiopsdik Pusdikif, Dansat Diklat, Pasiops Diklat, Pasimin Diklat, Danton Kelas Diklat, Gadik, dan Gapendik .

Metode Analisis data mengacu pada pendapat Milez, M. B. Dan Huberman, A. M., yang menjelaskan bahwa mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pendidikan bela Negara adalah upaya untuk mempertahankan Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan manajemen pendidikan dalam pendidikan bela Negara. Manajemen pendidikan adalah merupakan mekanisme kerjasama yang terprogram, terencana dan menyeluruh. Pendidikan itu sendiri memiliki fungsi seperti yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).

Fungsi manajemen pendidikan tersebut diterapkan terhadap 10

komponen pendidikan bela Negara Pusdikif. Kondisi dan proses dari penyiapan dan operasional 10 (sepuluh) Komponen Pendidikan memberikan kejelasan sejauh mana manajemen pendidikan diterapkan dalam pendidikan bela Negara.

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan bela Negara menjadi perangkat utama dalam sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan.

Dari keterangan para narasumber menunjukan bahwa kurikulum pendidikan bela Negara bukan menjadi suatu hal yang disusun secara baku, hal ini dilihat dari fungsi persiapan (*the propaedeutic function*) dan fungsi Penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*). Dari kedua fungsi tersebut terlihat kurikulum itu adalah produk yang dinamis sesuai dengan perubahan, yang disiapkan secara matang sebelum pelaksanaan pendidikan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun demikian, mengingat penyelenggaraan pendidikan bela Negara

dilaksanakan oleh berbagai instansi dan berbagai satuan di lingkungan TNI/TNI AD maka kurikulum dasar dipelukan untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan pendidikan bela Negara sehingga mungkin untuk dilakukan penilaian subjektif yang adil. Untuk itu perlu dilakukan pembentukan standar kurikulum pendidikan bela Negara melalui administrasi kurikulum pendidikan bela Negara. Administrasi kurikulum pendidikan ditentukan guna mencapai sasaran terwujudnya Katdaldik tingkat kebijaksanaan dan Katdaldik tingkat operasional. Patokan bagi pengadministrasian kurikulum yang dipergunakan saat ini adalah Buku Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara No. Skep /56/ XII/ 2004 tanggal 7 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pothan Dephan dan Buku Petunjuk Pelatihan Dasar Bela Negara Bagi Mahasiswa Sebagai Komponen Pendukung yang juga dikeluarkan oleh Dirjen Pothan Dephan pada tahun 2014. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perbedaan pengadministrasian dan penyelenggaraan pendidikan bela negara sehingga criteria keberhasilan pelaksanaan pendidikan berbeda antara penyelenggara baik dalam

satu instansi maupun dari berbagai instansi.

Setiap penyempurnaan, selain harus berdasar kepada beberapa landasan berpikir, menerapkan prinsip-prinsip yang benar. Dengan prinsip yang ada, pengembangan kurikulum terikat oleh ketentuan yang berlaku, sehingga didalam pengembangan harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan kaidah yang disepakati.

Dengan demikian Kurikulum adalah inti dari bidang pendidikan bela Negara dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan bela negara. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan bela negara, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum bela Negara membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda.. Kurikulum akan dibuat sedemikian rupa untuk mengimbangi perkembangan peserta didiknya.

Paket Instruksi adalah perangkat kelengkapan kesiapan tenaga pendidik dalam memberikan materi pelajaran guna tercapainya tujuan kurikuler/pelajaran dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Pembuatan atau penyusunan paket instruksi dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pegangan bagi tenaga pendidik dalam menyiapkan materi pelajaran dan dijadikan sebagai perangkat pelaksanaan pendidikan serta dijadikan sebagai kelengkapan dan pedoman bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Dari ketepatan beberapa nara sumber dapat ditarik benang merah bahwa Paket Instruksi yang ada dalam pendidikan bela negara telah cukup berperan sebagai sebagai pedoman, alat kendali, perangkat lunak utama bagi gadik dan serdik.

Hal yang mendasar dari keberadaan paket instruksi adalah bahwa paket instruksi tersebut harus memberikan fungsinya dalam menunjang pendidikan bela negara.

Dilihat dari pemenuhan terhadap fungsi paket instruksi maka dapat dikatakan bahwa paket instruksi yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan bela Negara di Pudikif telah menjalankan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan pendidikan.

Hal yang menonjol dari paket instruksi adalah kepastian adanya kesamaan dengan paket instruksi dalam penyelenggaraan pendidikan bela Negara. Untuk itu maka paket instruksi akan lebih

efektif jika disusun oleh Kemhan sebagai penentu kebijakan bela Negara. Khususnya paket instruksi berupa bahan pengajaran, buku/bahan latihan dan perangkat pengujian.

Tenaga pendidik menjadi salah satu komponen pendidikan yang utama yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan keberhasilannya.

Kebutuhan Gadik dalam pendidikan bela Negara secara kuantitas dapat terpenuhi dikarenakan Pusdikif didukung dengan perwira dan bintanga pendidik dan pelatih yang cukup. Kemudian dalam pembekalan teori dengan materi bela Negara dan yang lainnya selain materi taktik dapat diambil tenaga pendidik dari pihak luar atau orang sipil yang berkompeten. Akan tetapi secara kualitas masih belum terpenuhi. Tenaga pendidik yang berasal dari satuan Pusdikif masih ada yang belum memiliki kualifikasi pelatih atau pendidik. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembinaan guna tercapainya kemampuan tenaga pendidik yang memadai sesuai jenis pendidikan yang dilaksanakan.

Untuk membuktikan profesionalisme, seorang Gadik perlu memiliki minat belajar, mengetahui cara belajar, rasa percaya diri, prestasi tinggi,

etos kerja, produktif dan kreatif. Profesionalisme Gadik dilakukan dari kegiatan rutin sampai Diklat lanjutan. Peningkatan profesionalisme Gadik berkaitan dengan 4 kriteria kinerja karakteristik, peningkatan profesionalisme, kombinasi ketiganya. Seorang Gadik wajib memahami tugas serta tanggung jawabnya, menguasai kemampuan mengajar sesuai dengan bidangnya, semangat tinggi, serta inisiatif serta kemauan tinggi.

Berdasarkan keterangan dari nara sumber dapat digaris bawahi kesamaannya bahwa Tenaga Kependidikan Pusdikif telah menjalankan perannya dengan baik sebagai pendukung dalam suksesnya penyelenggaraan operasional pendidikan. Gapendik memiliki peran sebagai fasilitator bertugas menyiapkan serta menyajikan sumber sesuai kebutuhan, sebagai komunikator yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada Serdik, memiliki peran serta mengembangkan serta melakukan pembaharuan terhadap proses belajar mengajar, sebagai dinamisator yang mengaktifkan dan mendorong motivasi belajar Serdik, mengevaluasi hasil dari kegiatan belajar peserta didik, mengembangkan teknik evaluasi serta mengevaluasi pencapaian

tujuan belajar baik efektif, kognitif maupun psikomotorik; Sebagai pelatih, memberikan dan mengembangkan keterampilan atau kemampuan kesamaptaan jasmani peserta didik; dan sebagai pembimbing dan pengasuh, membantu memecahkan permasalahan yang akan ditemui peserta didik.

Fungsi, peran, tugas and tanggungjawab yang pada Gapendik dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini menandakan bahwa secara kualitas pekerjaan para gapendik menunjukan kinerja yang baik. Akan tetapi secara kualitas individual masih terdapat kekurangan karena adanya gapendik yang belum memiliki kualifikasi pendidikan pelatih. Oleh karenanya diperlukan pengembangan kualitas tenaga pendidik untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan jaman yang lebih modern dan kompleks.

Peserta didik adalah obyek pelaksana yang diberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan agar yang bersangkutan memiliki wawasan maupun keterampilan dalam suatu materi. Sebelum pelaksanaan pendidikan bela negara, Pusdikif selaku penyelenggara masih belum mengetahui bagaimana latar belakang, pengetahuan, karakter/sifat, kesehatan, maupun mental

dan jasmani para calon peserta didik yang akan mengikuti pendidikan bela negara. Oleh karenanya, dalam tahap perencanaan dan persiapan Pusdikif menyusun rencana bimbingan dan pengasuhan untuk mengarahkan dan membawa peserta didik dalam rangka melaksanakan tugas belajar serta pencapaian tujuan pendidikan.

Permasalahan terkait aspek peserta didik ini adalah perbedaan karakteristik peserta didik. Sementara itu belum ada aturan atau kebijakan dalam membatasi peserta didik melalui test atau seleksi. Hanya tes kesehatan yang dapat dijadikan pembatas bagi Pusdikif dalam menerima serdik bela Negara.

Alins/Alongins adalah bagian dari perangkat operasional pendidikan yang digunakan untuk membantu dan mempermudah Gumil dan pelatih dalam melaksanakan transfer ilmu kepada peserta didik guna menunjang keberhasilan pencapaian proses belajar mengajar di Pusdikif.

Keberadaan alin/alongin di Pusdikif cukup memadai karena sebagai lembaga pendidikan telah dilengkapi perangkat pendidikan. Namun demikian dihadapkan pada tuntutan efisiensi penggunaan waktu, maka kebutuhan akan alin alongin

perlu ditambah sesuai kebutuhan dan pengembangannya.

Pemilihan dan Penerapan metode pembelajaran dalam pendidikan bela Negara di Pusdikif dianggap telah sesuai karena dalam perencanaannya dilakukan pertimbangan terhadap berbagai factor terutama ketersediaan waktu dan kemampuan Gadik. Gadik-gadik Pusdikif yang sudah terbiasa dalam memberikan materi Diklat, diberikan keleluasaan kepada Gadik yang bersangkutan.

Fasilitas Pendidikan (Fasdik) adalah bagian dari perangkat operasional pendidikan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana yang memiliki fungsi untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan yang diambil Dankodiklat serta upaya upaya Danpusdikif dalam memenuhi kebutuhan Fasdik menjadikan secara kualitas maupun kuantitas Fasdik cukup memadai. Akan tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam jumlah dan kualitas pada fasdik tertentu. Untuk itu maka dukungan dari komandi atas perlu ditingkatkan terutama dukungan anggaran untuk penyediaan fasdik.

Evaluasi hasil belajar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan, meliputi

tingkat efisiensi serta efektivitas kurikulum pendidikan yaitu penentuan bahan pelajaran, kualitas dan kuantitas alat instruksi, metode pengajaran, bimbingan dan pengasuhan dengan menggunakan waktu dan kualitas serta kuantitas tenaga pendidik yang tersedia.

Penyelenggaraan evaluasi pendidikan bela negara di Pusdikif dilaksanakan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi kriteria keberhasilan terbesar dilihat dari hasil didik. Namun belum adanya standar penilaian yang baku terhadap keberhasilan pendidikan bela negara dapat menjadikan penilaian dalam evaluasi menjadi kurang akurat.

Anggaran merupakan rencana yang telah disusun secara sistematis melalui bentuk numerik yang dinyatakan dalam unit moneter meliputi seluruh kegiatan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Pengelolaan anggaran pendidikan adalah kegiatan yang sangat mendasar dalam pencapaian tujuan pendidikan, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan anggaran pendidikan tersebut harus sejalan dengan kegiatan perencanaan, persiapan,

pelaksanaan dan pengakhiran melalui pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien.

Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pendidikan bela Negara dan diterapkannya prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa pada aspek anggaran untuk kegiatan yang bekerjasama dengan pihak instansi lain tidak ada persoalan. Akan tetapi Pusdikif sendiri sebaiknya mampu melaksanakan pendidikan bela Negara, untuk mengundang kelompok pemuda tertentu seperti kelompok anak-anak putus sekolah, anak-anak dari yayasan, yatim piatu dan yang lainnya untuk mengikuti program bela Negara. Untuk itu akan lebih baik jika Pusdikif diberi dukungan anggaran bagi pelaksanaan pelatihan bela Negara secara mandiri.

Dalam teori manajemen pendidikan dijelaskan bahwa manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemandirian dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik, yang mencakup program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode dan yang lainnya. Fungsi-fungsi manajemen yang harus

dimiliki dalam manajemen pendidikan itu sendiri meliputi Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan.

Dilihat dari kondisi 10 komponen pendidikan dalam pendidikan Bela Negara di Pusdikif, seluruh fungsi manajemen telah dijalankan. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk perencanaan administrasi. Salah satunya dalam perencanaan administrasi kurikulum yang berbentuk Program Pendidikan (Progdik) dan yang lainnya, serta dilaksanakan pencatatan segala materi pada dokumen dan kurikulum yang memerlukan tindak lanjut sebelum pendidikan dibuka, khususnya hal-hal yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, atau yang dalam hal-hal tertentu memerlukan penyempurnaan. Namun demikian tidak adanya standar kurikulum baku menjadikan kurangnya pegangan dalam penentuan rencana kurikulum hal tersebut berlaku pada rencana pengadministrasian 10 komponen pendidikan lainnya. Dalam penetapan materi pendidikan bela negara, instansi yang mengikuti kegiatan Bela negara kerap kali menentukan materi pembelajaran sendiri menyesuaikan dengan tugas dan profesi. Sebenarnya tujuan instansi tersebut cukup baik agar

pendidikan bela negara secara langsung berdampak pada kondisi organisasi. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan pengurangan pada materi lainnya. Bilamana telah ada standart kurikulum bela negara, maka materi-materi titipan dari instansi dapat diakomodir dalam bentuk jam pelajaran tambahan. Demikian pula yang terjadi pada Gapendik dan Alins/Alongin serta munisi untuk kegiatan Latbak.tenaga pendidik dan alin/alongin menjadi terbatas atau kurang jika penyelenggaraan pendidikan bela negara bersamaan dengan kegiatan program kerja dan anggaran Pusdikif. Sedangkan Munisi memang tidak ada alokasi bagi pendidikan bela negara.

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah urat nadi organisasi dalam menjalankan program atau kegiatannya. Sebagai suatu kegiatan diluar program Pusdikif, maka pengorganisasian pendidikan bela Negara dilaksanakan sebelum pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, organisasi penyelenggara pendidikan bela Negara tidak termasuk dalam stuktur organiasi Pusdikif. Pengorganisasian menurut Heidjarachaman Ranupandjo adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pelaksanaannya dengan membagi tugas,

tanggung jawab , serta wewenang diantara kelompoknya, ditentukan juga yang akan menjadi pemimpin dan saling berintegrasi dengan aktif. Dari pemahaman tersebut maka pengorganisasian pendidikan bela Negara seharusnya masuk dalam organisasi dan tugas Pusdikif. Pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah bahwa dengan tidak adanya organisasi/ garis kewenangan dalam orgas pusdikif menjadikan adanya rangkap jabatan sehingga, pelaksanaan pendidikan bela Negara sulit untuk dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang sudah menjadi program Pusdikif. Bilamana kegiatan pendidikan bela negara dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan program pendidikan sesuai gropram kerja dan anggaran di Pusdikif, maka terjadi kekuarangan tenaga pendidik.

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengamati dan mengukur segala kegiatan operasi dan pencapaian hasil dengan membandingkan standar yang terlihat dalam rencana sebelumnya. Fungsi pengawasan menjamin segala kegiatan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, rencana, keputusan dalam program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan serta ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, belum adanya standart yang

baku dalam 10 Komponen pendidikan menjadikan kegiatan pengawasan hanya didasarkan pada kebenaran-kebenaran subjektif. Hal yang paling menonjol terlihat dalam penentuan kurikulum, tenaga pendidik, hasil didik dan evaluasi. Penetapan kurikulum hanya didasarkan pada Buku Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara No. Skep /56/ XII/ 2004 tanggal 7 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dirjen Potan Dephan dan Buku Petunjuk Pelatihan Dasar Bela Negara Bagi Mahasiswa Sebagai Komponen Pendukung yang juga dikeluarkan oleh Dirjen Potan Dephan pada tahun 2014. Kualifikasi Gadik yang diperlukan hanya didasarkan pada tingkat pendidikan yang telah dilalui yaitu sudah atau belum mengikuti Susgumil/Tih. Penilaian kecukupan kualitas Gadik belum dilakukan secara kuantitatif. Dalam hal siswa didik terlihat bahwa standar siswa yang mengikuti pendidikan belum ditetapkan, hanya didasarkan antara kecukupan umur yang berkisar antara 17-50 tahun. Alokasi serta kapasitas siswa ditentukan oleh instansi pengirim, sedangkan Pusdikif hanya sebagai penyelenggara. Kondisi kesehatan siswa didik juga belum terstandarisasi. Dalam hal evaluasi, penilaian hasil pendidikan peserta didik seharusnya menjadi tolak

ukur keberhasilan pendidikan, akan tetapi standar penilaian yang baku belum ada yang dapat dijadikan pegangan. Bilamana dipergunakan system penilaian standart TNI AD dalam penilaian jasmani siswa didik, akan sangat rawan kecelakaan latihan mengingat kondisi jasmani serdik dari masyarakat sipil berbeda dengan prajurit TNI AD. Oleh karenanya hasil penilaian menjadi kurang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan khususnya dibandingkan dengan pendidikan yang sama di tempat lain.

Standar penyelenggaraan suatu pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendidikan tersebut dalam rangka memperoleh tujuan dan sasaran pendidikan. Standar tersebut diperoleh melalui proses standarisasi, yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan (Peraturan Pemerintah, 2000).

Perumusan standar pendidikan bela Negara pada dapat dilakukan melalui tahapan yang berbentuk siklus (*life cycle*). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlunya suatu standar pendidikan bela

Negara sebagai bahan tindak lanjut pihak-pihak yang berkepentingan. Kedepannya perlu dilaksanakan Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja badan/lembaga standardisasi nasional. Kemudian penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar (Peneliti, pakar sipil militer dibidang bela Negara dan pertahanan keamanan termasuk TNI dan Kemhan dan sebagainya) yang dikoordinasikan oleh panitia teknis. langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan *life cycle* penetapan standarisasi adalah konsensus mengenai rancangan standar, validasi melalui *public enquiry* nasional mencakup semua unsur pemerintah, sipil dan militer untuk memastikan keberterimaan secara luas, penetapan dan penerbitan standar, dan peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi. Hal tersebut dilaksanakan secara terus menerus/ dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh standart yang lebih sempurna.

Dalam hal *legalitas*, secara umum pendidikan bela negara dilandasi oleh Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional; Undang-Undang No.29 tahun

1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat; Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI, Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI; Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Akan tetapi diantara semua itu belum ada yang dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi Pusdikif atau satuan-satuan TNI AD lainnya sebagai penyelenggara pendidikan bela Negara. Selama ini kegiatan Diklat didasari dengan MoU antara pihak TNI seperti Panglima, Kasad, Pangdam hingga Dandim dengan pihak instansi-instansi terkait seperti Kemenristek Dikti, Kemenkumham, pemda, atau instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta. Untuk memberikan landasan pelaksanaan yang lebih kuat bagi satuan/instansi pelaksana maka diperlukan kebijakan berupa Kepres yang memberikan kewenangan bagi TNI/TNI AD untuk bertindak sebagai pelaksana pendidikan bela Negara.

Kesimpulan

Sesuai dengan Undang-undang, bela Negara adalah suatu hak dan kewajiban

bagi seluruh bangsa Indonesia untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Peran penting Bela Negara dapat dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam melalui pola pandang pertahanan. Keutuhan wilayah NKRI, beserta keseluruhan sumber daya nasional, kedaulatan dan kemerdekaannya, memperoleh ancaman baik dari luar maupun ancaman dari dalam. Untuk itulah para pemuda sebagai masa depan sekaligus kekuatan sumberdaya manusia memiliki hak dan kewajiban untuk turut membela Negara sesuai sistem pertahanan kita yang menganut sistem pertahanan semesta yang menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan didukung dengan kekuatan pendukung yang salah satunya adalah rakyat Indonesia. Kesadaran akan nasionalisme dan bela negara merupakan kesediaan berbakti dan berkorban untuk membela negara. Tanpa kesadaran bela Negara niscara kesediaan bekorban membela Negara dari para pemuda akan sulit didapatkan yang berarti kita telah kehilangan kekuatan pendukung pertahanan tersebut. Kesadaran bela negara yang kita harapkan adalah tumbuhnya kondisi psikologi, sikap serta perilaku dan tindakan dari setiap anak bangsa terutama kaum pemuda

dikarenakan kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya membangun kesadaran bela Negara dari para pemuda telah lama dilakukan oleh pemerintah. Kali ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengimplementasikannya melalui suatu program pendidikan bela Negara. Pusdikif sebagai bagian dari TNI AD di tunjuk sebagai pelaksana program pendidikan bela Negara. Selama ini pusdikif telah mampu melaksanakan program pendidikan bela Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Pusdikif/Pusenif/Kodiklat TNI AD dengan pihak instansi swasta atau pemerintah. penyelenggaraan program pendidikan bela Negara di maksudkan untuk mendidik pemuda usia 17-50 tahun, untuk dididik di pusdikif guna meningkatkan kesadaran bela Negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan Negara dan kecintaan kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Pudukif terdapat 10 (sepuluh) komponen pendidikan yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bela negara. Kesiapan dan penggunaan 10

komponen pendidikan antara lain kurikulum pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, dan lainnya sangat mempengaruhi pencapaian hasil penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan bela negara keberadaan dan kesiapan 10 komponen pendidikan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena lemahnya salah satu komponen pendidikan tersebut dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan bela negara secara keseluruhan. Secara umum kondisi kesepuluh komponen pendidikan di pusdikif dalam kondisi cukup baik untuk melaksanakan pendidikan bela negara. Hal ini lebih kepada kedudukan dan fungsi Pusdikif itu sendiri untuk menyelenggarakan pendidikan bagi personel TNI AD sehingga Pusdikif telah dilengkapi dengan 10 komponen pendidikan yang memadai. Dengan menggunakan teori manajemen pendidikan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelemahan utama dari penyelenggaraan pendidikan bela negara di pusdikif adalah belum adanya standart baku yang dapat diterapkan dalam penentuan kriteria kondisi 10 komponen pendidikan. Standar adalah suatu hal yang penting dalam menentukan kelayakan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan bela

negara. Standar baku dari 10 komponen pendidikan akan dapat memberikan tolak ukur yang jelas secara kuantitatif kondisi 10 komponen pendidikan yang harus dimiliki atau dicapai.

Rekomendasi

Bedasarkan uraian pada poin-poin kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan bela Negara di Pusdikif serta di tempat lainnya, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi.

Agar Pusdikif lebih meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik/Guru Militer yang dimilikinya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Gumil/gadik untuk menumpuh pendidikan Susgumil/Tih. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembekalan kepada para Gumil/gadik khususnya terkait dengan pendidikan bela Negara dalam bentuk sosialisasi pengajaran atau pendidikan khusus bagi pendidik dan pelatih bela Negara.

Agar Pusdikif sebagai lembaga pendidikan terus melaksanakan penyempurnaan fasilitas pendidikan dan alin/alongin melalui pengadaan dan pemeliharaan yang lebih baik sehingga

selalu dalam keadaan siap operasional menjalankan pendidikan bela negara.

Agar dibentuk team penyusun/teknis untuk merealisasikan terbentuknya standar penyelenggaraan pendidikan bela negara. Selanjutnya, standart tersebut perlu untuk disosialisasikan ke lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan bela negara.

Agar pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden sebagai landasan bagi satuan/instansi yang menjadi pelaksana pendidikan bela negara.

Agar pendidikan bela negara dimasukan dalam program dan anggaran satuan Komando Kewilayahan. Dengan demikian maka Kowil dapat menjadi penyelenggara program pendidikan bela negara sedangkan Pusdikif serta jajaran pusdik lainnya menjadi pelaksana dimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Pusdik-Pusdik jajaran Kodiklat maupun di Rindam. Dengan memasukan pendidikan bela negara pada program dan anggaran Kowil, maka secara anggaran akan dapat terdukung. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara terbatas misalnya 200 orang pemuda peserta didik untuk triwulan. Dengan program tersebut Kowil beserta Pusdik dapat menentukan standart peserta didik yang dapat mengikuti serta menentukan bentuk

kurikulum dan metode pendidikan yang lebih tepat dengan pertimbangan usia, kesehatan, keterampilan dan pendidikan peserta didik bela negara.

Daftar Pustaka

- Darmodiharjo, Darji, dkk. 1991. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usana Offset. Printing. Hal.67
- Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal.70
- <http://news.liputan6.com/read/2339910/meramu-wajib-militer-ala-indonesia>
- Pujirahayu, Rostanti. (2008). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusiadalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat pada Aparatur Sekretariat Daerah. Hal.18
- Suprihanto, John. 1988. Penilaian Pelaksanaan dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta: BPFEE. Hal.86
- Yusgiantoro, Purnomo, 2010, Ekonomi Pertahanan, Jakarta : PT Gramedia. Hal.39

